

3 PELATIHAN "PROJECT CYCLE" DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

3.1 Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014

Dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman periode 2010-2014, Kementerian Pekerjaan Umum selain akan menjalankan tugas melaksanakan pembangunan (*operator*) yang menjadi kewenangan Pemerintah, juga memerlukan upaya untuk memantapkan peran sebagai *regulator* dan *facilitator*. Prioritas yang perlu dilaksanakan adalah *capacity building* (penguatan kelembagaan) untuk manajemen sumber daya manusia baik di pusat maupun di daerah, serta meningkatkan koordinasi kelembagaan, terutama yang sifatnya lintas sektor dan lintas daerah untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan potensi sumber daya yang ada dalam rangka mengantisipasi peningkatan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Kebijakan operasional Kementerian Pekerjaan Umum antara lain adalah mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah, sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis, menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

3.1.1 Mandat, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum

Mandat yang diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dibagi ke dalam 2 bidang utama, yaitu urusan bidang Pekerjaan Umum dan urusan bidang Penataan Ruang.

Tugas Kementerian Pekerjaan Umum adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman.

Adapun fungsi Kementerian Pekerjaan Umum antara lain adalah:

- (i) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- (ii) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- (iii) Pelaksanaan kegiatan teknis bidang pekerjaan umum, permukiman, jasa konstruksi, dan penataan ruang yang berskala nasional.

Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum antara lain menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pekerjaan umum dan permukiman.

3.1.2 Peran Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman

Memasuki *era millennium* ketiga, Indonesia dan seluruh negara di dunia memasuki era kompetisi antar-negara yang ketat. Dapat dikatakan bahwa posisi dan peran suatu negara dalam percaturan perekonomian dunia akan banyak ditentukan oleh daya saingnya secara relatif terhadap negara lain. Semakin tinggi daya saing suatu negara, maka semakin diperhitungkan pula peran dan posisi negara tersebut, serta semakin besar peluang untuk menarik investasi asing. Salah satu faktor yang menentukan daya saing nasional adalah ketersediaan dan kualitas infrastrukturnya.

Bagi Indonesia, infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing di dunia internasional. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan

pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena sejak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai *multiplier* ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman.

Di samping itu, infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor lainnya antara lain sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan. Dengan demikian, upaya pembangunan infrastruktur perlu direncanakan dengan selektif dan matang sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, termasuk kaitannya dengan pencapaian sasaran-sasaran MDGs pada tahun 2015 mendatang.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 *strategic goals*, yaitu: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, dan infrastruktur permukiman.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur bukan hanya harus benar-benar dirancang secara selektif dan diimplementasikan secara sistematis, tetapi juga harus berkualitas supaya mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (*economic gains*), menghadirkan keuntungan sosial (*social benefits*), meningkatkan layanan publik (*public services*), serta meningkatkan partisipasi politik (*political participation*) di segenap lapisan masyarakat.

3.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum

Visi Kementerian Pekerjaan Umum: "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025". Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2025, sehingga infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi, serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Secara ringkas misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014 adalah: mewujudkan penataan ruang, menyelenggarakan pengelolaan sumber daya alam secara efisien, efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam serta mengurangi resiko daya rusak air, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif, menyelenggarakan industri

konstruksi yang kompetitif, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, norma, standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman, menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi, serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, meminimalkan penyimpangan dan praktek-praktek korupsi-kolusi-nepotisme di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum, maka secara ringkas tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010 – 2014 adalah: 1) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan; 2) meningkatkan keandalan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kualitas lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; 4) optimalisasi peran koordinasi, sistem informasi, data, sumber daya manusia, kelembagaan dan administrasi; dan 5) akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Sasaran rinci Kementerian Pekerjaan Umum dalam periode 2010 – 2014 antara lain meliputi kelembagaan adalah sebagai berikut:

- (i) Terlaksananya pembinaan kelembagaan (organisasi, sumber daya manusia, dan masyarakat) dalam rangka meningkatkan kemampuan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

- (ii) Meningkatnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan kebijakan pembina jasa konstruksi pusat dan daerah;
- (iii) Optimalisasi peran dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman;
- (iv) Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana, serta perencanaan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan kompeten sesuai jabatan dan bidang tugasnya;
- (v) Meningkatnya kompetensi aparatur bidang pekerjaan umum dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.

3.1.4 Kebijakan dan Strategi Kementerian Pekerjaan Umum

Berdasarkan arah RPJPN tersebut, maka prioritas pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman 2010-2014 secara ringkas adalah sebagai berikut:

- (i) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan pada efisiensi dan tanggung jawab dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang langka.
- (ii) Percepatan pembangunan untuk peningkatan daya saing perekonomian dan pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
- (iii) Peningkatan kesejahteraan dan penurunan kesenjangan kesejahteraan antar-kelompok masyarakat, dan antar-daerah.
- (iv) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel.

Sasaran jangka panjang infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman antara lain adalah meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.

Arahan jangka panjang infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman antara lain adalah:

- (i) Jasa infrastruktur dikembangkan dengan menerapkan sistem dan standar internasional dan mendukung kepentingan strategis pengembangan sumber daya manusia.
- (ii) Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi hukum dan birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

3.1.5 Program dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum

Salah satu program dan kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Program Dukungan Manajemen dengan *outcome* terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- (i) Persentase sumber daya manusia aparatur profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas dan jabatannya.
- (ii) Persentase peserta pendidikan dan pelatihan yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan dalam melakukan tugas dan jabatan.

Dalam mencapai visi jangka panjang, misi, dan tujuan organisasi, kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum perlu menjalankan penataan aparatur atau reformasi birokrasi yang menyeluruh dan dilaksanakan secara bertahap. Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut

aspek-aspek kelembagaan / organisasi, ketatalaksanaan (*business process*), regulasi, serta sumber daya manusia aparatur negara, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kebijakan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia ini, salah satunya ditempuh melalui pengembangan dan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan yang selaras dan terintegrasi dengan pola *career planning*. Setiap kenaikan posisi jabatan harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi baik substansi manajerial, teknis, maupun fungsionalnya. Oleh karenanya, pelaksanaan diklat harus didasarkan pada kebutuhan peningkatan kompetensi individu maupun kinerja unit organisasi yang mengutusinya. Diklat yang dikembangkan harus berbasis kompetensi dengan kurikulum yang memperhatikan jenis dan jenjang diklat serta *target group*-nya. Pelaksanaan diklat dapat dilakukan baik di institusi diklat intern Kementerian Pekerjaan Umum maupun diklat di luar Kementerian Pekerjaan Umum, baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan permukiman juga perlu dilakukan *Training of Trainers* substansi bidang pekerjaan umum dan permukiman bagi instruktur yang ada pada unit-unit kerja diklat di tingkat provinsi sehingga mereka dapat memberikan diklat untuk pegawai negeri sipil di provinsinya sendiri maupun di kabupaten/kota. Pelaksanaan diklat di masa depan juga memerlukan pembenahan, penguatan, dan sinergi institusi dengan unit-unit kerja lainnya, seperti kepegawaian dan kelembagaan di internal Kementerian Pekerjaan Umum termasuk dengan institusi daerah.

3.2 Pelatihan 'Project Cycle' Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum sebagai organisasi pemerintah mempunyai misi yang sangat mulia, yaitu memberikan pelayanan, perlindungan dan rasa aman, serta mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan kepada warga negaranya. Sehubungan dengan itu, Kementerian Pekerjaan Umum telah melaksanakan program pelatihan bagi aparatnya di tingkat pusat maupun aparat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2009 dan dilanjutkan dalam Renstra 2010-2014 agar supaya dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dengan produktif dan memuaskan.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum adalah pelatihan tentang "*Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects*". Pelatihan ini disebut Pelatihan "*Project Cycle*", sebagaimana telah diuraikan secara ringkas pada Bab I Pendahuluan. Pada awalnya dahulu tahun 1980-an pelatihan ini didesain untuk pembekalan kepada para *professional engineers*, baik yang bekerja sebagai konsultan (*team leader*) yang tergabung di bawah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) maupun sebagai aparat (*project manager*) Departemen Pekerjaan Umum, untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, khususnya yang dibiayai oleh *donor agencies*. Pada tahun 1986 – 1995 *Training Course on Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects* ini telah dilaksanakan di *Development and Project Planning Centre (DPPC), University of Bradford, England*, atas kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris.

Pada tahun 1997 – 2002 INKINDO telah melaksanakan Pelatihan "*Project Cycle*" untuk para tenaga ahli di bawah INKINDO di berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun 2003 INKINDO bersama dengan Tim Ahli Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kementerian Pekerjaan Umum) mengadakan lokakarya dengan

acara diskusi *updating* materi pelatihan “*Project Cycle*”. Lokakarya tersebut telah mengeluarkan rekomendasi, antara lain bahwa materi pelatihan “*Project Cycle*” adalah *marketable* dan perlu diberikan baik kepada konsultan maupun aparat Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Berdasarkan rekomendasi lokarya tersebut di atas, maka pada tahun 2006-2009 Departemen Pekerjaan Umum telah mengadakan pelatihan “*Project Cycle*” bagi para aparat Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia secara bersama-sama, sehingga diharapkan dapat menghasilkan persamaan persepsi antar-tingkat-aparat mengenai perencanaan, penilaian dan manajemen proyek-proyek infrastruktur di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Namun demikian, penelitian tentang efektivitas pelatihan “*Project Cycle*” Kementerian Pekerjaan Umum ini belum pernah dilakukan.

3.2.1 Tujuan Pelatihan

Tujuan Pelatihan “*Project Cycle*” ini adalah agar supaya aparat Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia menjadi tenaga yang profesional, sehingga mampu membuat perencanaan yang matang, mampu menilai kelayakan proyek, serta menerapkan manajemen proyek yang modern, agar supaya proyek selesai tepat waktu dengan biaya sesuai yang direncanakan serta berkualitas tinggi (*Leaflet* Pelatihan “*Project Cycle*” Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

3.2.2 Materi Pelatihan

Pelatihan "*Project Cycle*" adalah pelatihan mengenai Perencanaan, Penilaian dan Manajemen Proyek-Proyek Infrastruktur (*Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects*). Materi pelatihan "*Project Cycle*" terdiri atas 8 *Module* / 42 *Submodule*, secara garis besar adalah sebagai berikut:

- (i) *Module I* : *Concept and Indicators of Development; National, Sectors, and Project Planning; Sustainability; Project Definition and Project Sequence; and Project Framework.*
- (ii) *Module II* : *Project Identification; Demand Analysis; Forecasting; Regression and Correlation; Capacity Estimation of Present Facilities; and Establishing Gap for Identification of Projects.*
- (iii) *Module III* : *Time Value of Money; Capital Recovery Factor and Sinking Fund Factor; Measures of Project Worth (NPV, IRR, BCR); Debt Repayment; Annual Statement of Cost and Benefit; and Uncertainty Analysis.*
- (iv) *Module IV* : *Project Formulation; Choice of Technology; Economies of Scale; Cost Concept and Cost Estimation; Benefit Enumeration of Project; Cost Effectiveness Analysis; Community Participation; Mutually Exclusive Projects; Joint Cost Allocation; and Analysis of Multi-purpose Projects.*
- (v) *Module V* : *Environment Impact Assessment; and Land Acquisition and Resettlement Action Plan.*
- (vi) *Module VI* : *Financial Analysis of Projects; and Cost Recovery and Tariff Design.*

- (vii) *Module VII : Economic Appraisal of Projects; Shadow Pricing; Traded and Non-traded; and Shadow Discount Rate.*
- (viii) *Module VIII : Project Implementation, Management and Control Cycle; Planning the Work; Project Management Organization; Project Management Information System; Contract and Bid Evaluation; Working the Plan; and Private Sector.*

Uraian secara rinci setiap submodul disajikan pada Lampiran 3.2.1.

3.2.3 Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan “*Project Cycle*” adalah aparat Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, khususnya yang terlibat langsung dalam proses penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Persyaratan peserta Pelatihan “*Project Cycle*” adalah pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1), menguasai penggunaan *computer* dan *software*-nya, dan jabatan struktural serendah-rendahnya Eselon IV/Staf Senior/Auditor Madya/Auditor Muda/Staf Potensial di Lingkungan Unit Eselon I – Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Tenaga Ahli Anggota INKINDO serta Perguruan Tinggi.

Jumlah peserta pada setiap angkatan dibatasi maksimal 25 orang dan ditetapkan oleh Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Rekrutmen peserta pelatihan dilakukan dengan surat edaran pendaftaran calon peserta yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum, dilengkapi dengan persyaratan peserta dan ditujukan kepada Sekretariat Inspektorat

Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Balitbang, Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, Kepala Biro Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, serta Universitas. Setelah pendaftaran calon peserta masuk, selanjutnya calon peserta yang dinyatakan diterima untuk mengikuti pelatihan diberitahu dengan surat pemanggilan peserta yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum.

3.2.4 Pengajar Pelatihan

Pengajar yang memberikan pelatihan "*Project Cycle*" ini adalah tenaga ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) yang mempunyai kompetensi, bersertifikat pelatihan "*Project Cycle*", *alumni Training Course on Planning, Appraisal and Management of Infrastructure Projects* yang dilaksanakan oleh *Development and Project Planning Centre (DPPC), University of Bradford, England*, atas kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris tahun 1986-1995.

3.2.5 Metode Pengajaran

Metode pengajaran yang diterapkan dalam pelatihan "*Project Cycle*" ini adalah sebagai berikut: tatap muka, diskusi, studi kasus, dan *exercises* (latihan mengerjakan soal). Pada akhir sesi pelatihan dilakukan *post-test*, dengan nilai yang diperoleh dapat diketahui gambaran seberapa besar masing-masing peserta pelatihan mampu menyerap materi pelatihan yang diberikan.

3.2.6 Pengguna Jasa

Pengguna jasa Pelatihan "*Project Cycle*" ini adalah Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pengkajian Strategi Pembangunan, Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum.

3.2.7 Penyelenggaraan Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan "*Project Cycle*" tahun 2006 – 2009 telah dilakukan sebanyak 18 angkatan, setiap tahun berturut-turut sebanyak 7 angkatan, 4 angkatan, 3 angkatan, dan 4 angkatan. Setiap kali pelatihan diikuti kurang-lebih 30 peserta, sehingga selama 4 tahun telah diselenggarakan pelatihan dengan jumlah 525 peserta. Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelatihan ini setiap angkatan selama 6 hari / 50 jam pelajaran a 45 menit.

3.2.8 Lokasi Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan "*Project Cycle*" tahun 2006 – 2009 telah dilakukan dengan mengambil lokasi di berbagai ibukota provinsi dan kota-kota besar di Indonesia. Tabel daftar lokasi pelaksanaan pelatihan "*Project Cycle*" 2006 – 2009 tercantum pada Lampiran 3.2.8.

3.2.9 Sumber Dana

Sumber dana kegiatan Pelatihan "*Project Cycle*" ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Unit Kegiatan Penyelenggaraan Pengkajian Strategi Pembangunan, DIPA Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum.

3.2.10 Jadwal Pelajaran

Jadwal pelajaran pelaksanaan kegiatan sehari-hari pelatihan "*Project Cycle*" setiap angkatan selama 6 hari disajikan pada Lampiran 3.2.9.

